KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BSATW74V

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

,										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 N	A.1 NPWP : 8 2 6 4 6 4 4 5 5 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :										
A.3 Nama : KARTIKA RIZKY ANANDA										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
	3 21-402-01			1.200.000	1.200.000	0	5	60.000		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01490/LS.TJ/RSJD.AHM/2022										
Nama Dokum				en Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mm yyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0										
				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit Organisasi :		$\overline{\Box}$								
C.4	.4 Tanggal : 1		1 6	dd 0 3 mm	2 0 2 2 уууу			_		
C.5										
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang ik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	s mengatur bahwa s	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		